

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal Andi. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni.
- Amiruddin. (2010). *KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Genta Publishing.
- Ardiyansyah Kurnia. (2020). *ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019*.
- Arief Nawawi Barda. (2003). *KAPITA SENGKETA HUKUM PIDANA*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Arief Nawawi Barda. (2008a). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Preneda Media Group.
- Arief Nawawi Barda. (2008b). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Preneda Media Group.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AeLJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=buku+Barda+Nawawi+Arief+tentang+penanggulangan+kejahatan&ots=kNH0E3EX3l&sig=Loes5nZlPSTYYaFGfJbIrnNN2IE&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+Barda+Nawawi+Arief+tentang+penanggulangan+keja
- Ariyanti Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Yuridis*, 6(2).
- Arleta, G. (2019). *Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli*. 20(1), 148–171.
- Chazawi, A. (2008). *HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. Alumni.
- Effendy, M. (2013). *KORUPSI DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN*

SERTA PEMBERANTASAN. Refferensi (GP Group).

Fadlian Aryo. (2020). *Pertanggungjawaban dalam Suatu Kerangka Teoritis*. 5(2).

Fahd, A., & Suryanto, B. (2021). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA*. 1(July).

Farid Abidin Zainal. (2007). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.

Fattahila Ahmad. (2016). *Kedudukan Penasihat Hukum yang berasal dari Militer dan beracara mendampingi terdakwa PNS TNI dalam beracara di Pengadilan Umum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ghuffan, Ahmad, & Sudarsono. (1991). *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Rineka Cipta.

Hamzah Andi. (1997). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Handani, Valerie, A. (2019). *NEPOTISME DAN GRATIFIKASI SEBAGAI UNSUR BUDAYA PADA KORUPSI POLITIK DAN BIROKRASI DI INDONESIA*. In *peningkatan kualitas publikasi ilmiah melalui hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat*. Universitas Indraprasta PGRI.

Hariato, F. (2020). *PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI POLA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA*. Universitas Andalas.

Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1), 138–149.

Huda Chairul. (2006). *Dari Tiada Pudana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. *Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Preneda Media Group.

Ibid. (n.d.).

Irmawanti Devy Noveria. (2021). *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana* (Vol. 3, Issue 4). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. KPK.

Kumendong, Jh Wempie. (2017). *KAJIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016*. 5(7), 9.

kusumaatmadja mochtar. (1975). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bina Cipta.

Kusumaatmadja Mochtar. (2002). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.

Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1,(No.2), p.5.

Lamintang, P. A. ., & Theo, L. (2012a). *Hukum Panitensier Indonesia*. Sinar Grafika.

Lamintang, P. A. ., & Theo, L. (2012b). *Hukum Panitensier Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Manan Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. AAI.

Mapaung Laden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Maradona, T. B. (2020). *TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM*. 8, 26–39.

Marbela, S. (2023). *Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya*

Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik. 1.

- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Refika Aditama.
- Marzuki Mahmud Peter. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki Mahmud Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. prenada kencana media group.
- Marzuki Mahmud Peter. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Preneda Media Group.
- Mertokusumo Sudikno. (1991). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Mertokusumo Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Mulyadi Lilik. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni.
- Musanef Rosdakarya. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung.
- Prakoso Djoko, & Nurwachid. (1983). *Studi tentang Pendapat-Pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo Martiman. (1987). *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo Satjipto. (2001). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru.
- Rahmadana Fitri Muhammad, dkk. (2020). *Pelayanan Publik (Simarmata Janner (Ed.)). Yayasan Kita Menulis*.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2xABEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pelayanan+publik+dan+asn+&ots=X_a5QHKQWo&sig=abebZKHYwTnTgKuq5qP9_1_E1Pk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
- Sadewa Fras Redho. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap Angkutan Batu Bara yang Dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah*

Hukum Muara Enim. Sriwijaya.

Saleh Roeslan. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.

Sholehuddin. M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajawali Pers.

Sinambela Poltak Lijan. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.

Sudarto. (1977). *HUKUM DAN HUKUM PIDANA*. Alumni.

Supriyono. (2016). *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*. 14(1567–1582).

Utrecht. (2000). *RANGKAIAN SARI KULIAH HUKUM PIDANA I*. Pustaka Tinta Mas.

Widjaja.W.A. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali.

B. Sumber Lain-lain

Ardiyansyah Kurnia. (2020). *ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019*.

Ariyanti Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Yuridis*, 6(2).

Arleta, G. (2019). Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli. 20(1), 148–171.

Fadlian Aryo. (2020). *Pertanggungjawaban dalam Suatu Kerangka Teoritis*. 5(2).

Fattahila Ahmad. (2016). *Kedudukan Penasihat Hukum yang berasal dari Militer*

dan beracara mendampingi terdakwa PNS TNI dalam beracara di Pengadilan Umum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1), 138–149.
- I, W. Y. A. W., I, S. N., & I, S. G. N. (2020). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)*. 1(2), 139–144.
- Irmawanti Devy Noveria. (2021). *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana* (Vol. 3, Issue 4). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jaya Dianita Debby. (2018). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. *Universitas Riau*, 5.
- Kumendong. Jh Wempie. (2017). *KAJIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016*. 5(7), 9.
- Pandiangan V Irvan Hatur. (2020). **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN SURAT TANAH OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN.Srh)**. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 125.
- Ramadhani Wahyu. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Luar Terhadap Pelayanan Publik*. 12(2).
- Sadewa Fras Redho. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap Angkutan Batu Bara yang Dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Hukum Muara Enim*. Sriwijaya.

Supriyono. (2016). *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*. 14(1567–1582)

Pungli di SMKN 5 Bandung, 5 Panitia PPDB Ditangkap, Ada Kuitansi Pembelian Seragam. <https://bandung.kompas.com/read/2022/06/24/050000778/pungli-di-smkn-5-bandung-5-panitia-ppdb-ditangkap-ada-kuitansi-pembelian?page=all>

3 ASN di Kabupaten Bandung Diduga Lakukan Pungli terhadap Kepala Sekolah. <https://jabar.inews.id/berita/3-asn-di-kabupaten-bandung-diduga-lakukan-pungli-terhadap-kepala-sekolah/all>

Diduga Pungli Kepsek SD di Bandung, 3 ASN Diperiksa Satgas Saber Pungli. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5648674/diduga-pungli-kepsek-sd-di-bandung-3-asn-diperiksa-satgas-saber-pungli>

Kronologi Dugaan Pungli di SMKN 5 Bandung, Lima Panitia PPDB dan Uang Rp. 40 Juta Diamankan. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-014823081/kronologi-dugaan-pungli-di-smkn-5-bandung-lima-panitia-ppdb-dan-uang-rp40-juta-diamankan>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;